



# PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RSUD DOKTER SOESELO

Alamat : Jalan dr. Soetomo No.63  
Telp.(0283) 491016-491761-491430 Fax.491016 Slawi



## SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Pembangunan Gedung IGD/Ponek Lanjutan

Nomor : ..... *[diisi nomor Kontrak]*

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “**Kontrak**” dibuat dan ditandatangani di Slawi pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... *[tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf]*, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor..... tanggal ....., Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ..... tanggal ... ..... 2024 , antara:

Nama : dr. GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN, M.Sc.,Sp. An  
NIP : 19700309 200312 1 005  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Berkedudukan di : Jl. dr. Soetomo No.63 Slawi Kabupaten Tegal

yang bertindak untuk dan atas nama RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/1575 tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penetapan Penggunaan Anggaran pada Perangkat Daerah dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tegal selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatanganan Kontrak**”, dengan:

Nama : ..... *[nama wakli Penyedia]*  
Jabatan : ..... *[sesuai akta notaris]*  
Berkedudukan di : ..... *[alamat Penyedia]*  
Akta Notaris Nomor : ..... *[sesuai akta notaris]*  
Tanggal : ..... *[tanggal penerbitan akta]*  
Notaris : ..... *[nama notaris penerbit akta]*

yang bertindak untuk dan atas nama ..... *[nama badan usaha]* selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

### PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung IGD/Ponek Lanjutan sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “**Pekerjaan Konstruksi**”;

- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat y Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung IGD/Ponek Lanjutan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

#### Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

- 1. Pekerjaan Persiapan dan SMKK;
- 2. Pekerjaan Struktur;
- 3. Pekerjaan Arsitektur;
- 4. Pekerjaan Elektrikal; dan
- 5. Pekerjaan Mekanikal.

#### Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. .... (*..... ditulis dalam huruf .....*) dengan kode akun kegiatan kegiatan 1-02.02.2.01.0022.5.2.03.01.01.0006;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Kabupaten Tegal;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank .... rekening nomor : ..... atas nama Penyedia : .....

#### Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
- a. adendum Kontrak (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Surat Penawaran;
  - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - f. spesifikasi teknis dan gambar;
  - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
  - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5  
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 120 (*Seratus dua puluh*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 365 (*Tiga ratus enam puluh lima*) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
*Penyedia..... [diisi nama badan usaha]*

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak maka rekatkan meterai Rp10.000,00)]*

*[nama lengkap]  
[jabatan]*

Untuk dan atas nama  
*Pejabat Penandatanganan Kontrak  
Pembangunan Gedung IGD/Ponek Lanjutan*

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp10.000,00)]*

*dr. GUNTUR M. TAQWIN, M.Sc., Sp.An  
NIP. 19700309 200312 1 005*



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

**RSUD dr. SOESELO**

Alamat : Jln. Dr. Sutomo No.63 Slawi Kabupaten Tegal,

Tlp. (0283) 491016491761, Fax.491016 Slawi 52419

Website:www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id, E-mail: kontak@rsudsoeselo.com



**dr. Soeselo**  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEGAL

### SURAT PERNYATAAN

Mendasari Monev Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 bahwa pada pekerjaan Biaya Jasa Kebersihan Rumah Sakit pada RSUD dr. Soeselo kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat dokumen antara lain :

#### PENGADAAN JASA KEBERSIHAN TAHUN 2024

No	Jenis Dokumen	Keterangan
1	Dokumen tentang pengadaan barang dan jasa tahun 2024 yang sekurang-kurangnya memuat 1)Nama lelang 2)Tanggal pembuatan 3)Lingkup pekerjaan 4)Tahapan lelang 5)Metode pengadaan 6)Tahun anggaran 7)Nilai pagu paket dan HPS 8)Lokasi pekerjaan 9)Syarat Kualifikasi	Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka hanya mengumumkan informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)
2	Rancangan Kontrak	Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka menggunakan surat perjanjian dan bukan rancangan kontrak
3	Dokumen persyaratan penyedia atau lembar data kualifikasi	Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat dokumen persyaratan penyedia atau lembar data kualifikasi

No	Jenis Dokumen	Keterangan
4	Dokumen persyaratan proses pemilihan atau lembar data pemilihan	Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat dokumen persyaratan proses pemilihan atau lembar data pemilihan
5	Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan	Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan
6	Gambar rancangan pekerjaan	Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat gambar rancangan pekerjaan
7	Dokumen studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan	Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat dokumen studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan
8	Sertifikat atau lisensi yg masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat Sertifikat atau lisensi yg masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

No	Jenis Dokumen	Keterangan
9	Berita acara pemberian penjelasan	Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat berita acara pemberian penjelasan
10	Berita acara sanggah dan sanggah banding	Pada pekerjaan tersebut penyedia tidak melakukan sanggah
11	Berita acara penetapan atau pengumuman penyedia	Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka dokumen berupa Berita Acara Hasil Pengadaan Metode E-Purchasing
12	Laporan hasil pemilihan penyedia	Sudah tercantum dalam Berita Acara Hasil Pengadaan Metode E-Purchasing
13	Surat Perjanjian Kemitraan	Pelaksanaan pekerjaan tidak mengenal Surat Perjanjian Kemitraan
14	Surat Perjanjian Swakelola	Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat surat perjanjian swakelola
15	Surat penugasan atau surat pembentukan tim swakelola	Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat surat penugasan atau surat pembentukan tim swakelola
16	Nota Kesepahaman atau <i>Memorandum of Understanding</i>	Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka menggunakan surat perjanjian dan tidak terdapat dokumen Nota Kesepahaman atau <i>Memorandum of Understanding</i>

No	Jenis Dokumen	Keterangan
17	Surat Perintah Mulai Kerja	Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat Surat Perintah Mulai Kerja
18	Surat Jaminan Pelaksanaan	Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat Surat Jaminan Pelaksanaan
19	Surat Jaminan Uang Muka	Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat Surat Jaminan Uang Muka
20	Surat Jaminan Pemeliharaan	Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat Surat Jaminan Pemeliharaan
21	Surat Tagihan	Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat Surat Tagihan
22	Surat Perintah Membayar	Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat Surat Perintah Membayar
23	Surat Perintah Pencairan Dana	Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat Surat Perintah Pencairan Dana

No	Jenis Dokumen	Keterangan
24	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan	Sudah tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan
25	Laporan Penyelesaian Pekerjaan	Sudah tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan

Untuk dan Atas Nama RSUD Dr. Soeselo Slawi  
Selaku PPKom Makan dan Minum Pasien



**MUHAMMAD SUGENG, S.ST, MM**  
NIP. 19750703 199703 1 007





### SURAT KETERANGAN

Mendasari Penyediaan Informasi Publik Tahun 2025 dimana seluruh perangkat daerah di kabupaten tegal selaku badan publik wajib menyediakan dan mengumumkan informasi dan dokumentasi publik, pada Pekerjaan Belanja Alat Kesehatan Rumah Sakit Tahun 2025 tidak terdapat dokumen antara lain :

#### PENGADAAN ALAT KESEHATAN TAHUN 2025

No	Jenis Dokumen	KETERANGAN
1.	A.02 Dokumen tentang pengadaan barang dan jasa tahun 2024 yang sekurang-kurangnya memuat 1)Nama lelang 2)Tanggal pembuatan 3)Lingkup pekerjaan 4)Tahapan lelang 5)Metode pengadaan 6)Tahun anggaran 7)Nilai pagu paket dan HPS 8)Lokasi pekerjaan 9)Syarat Kualifikasi	Mengingat pengadaan alkes dilakukan melalui pembelian secara E-Purchasing, maka hanya mengumumkan informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)
1	B.02 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka harga sudah tersedia di E-Katalog
2	B. 03 Spesifikasi Teknis;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen <del>Spesifikasi Teknis.</del>
3	B.04 Rancangan Kontrak ;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Rancangan Kontrak
4	B. 05 Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;
5	B. 06 Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau

		Lembar Data Pemilihan;
6	B.08 Jadwal Pelaksanaan dan Data Lokasi Pekerjaan;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Jadwal Pelaksanaan dan Data Lokasi Pekerjaan;
7	B.09 Gambar Rancangan Pekerjaan;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Jadwal Pelaksanaan dan Data Gambar Rancangan Pekerjaan;
8	B. 10 Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
9	B. 11 Dokumen Penawaran Administratif;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Penawaran Administratif;
10	B. 12 Surat Penawaran Penyedia;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Surat Penawaran Penyedia;
11	B. 13 Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Sertifikat atau Lisensi yang masih berlakudari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
12	B. 14 Berita Acara Pemberian Penjelasan;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Berita Acara Pemberian Penjelasan;
13	B.15 Berita Acara Pengumuman Negosiasi;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Berita Acara Pengumuman Negosiasi;
14	B. 16 Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;
15	B. 17 Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Berita Acara Penetapan atau

		Pengumuman Penyedia;
16	B. 18 Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;
17	B. 19 Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ);	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ);
18	B. 20 Surat Perjanjian Kemitraan;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Surat Perjanjian Kemitraan;
19	B. 21 Surat Perjanjian Swakelola;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Surat Perjanjian Swakelola;
20	B. 22 Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola
21	B. 23 Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding
22	C.2 Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak;
23	C. 3 Surat PerintahMulai Kerja;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Surat PerintahMulai Kerja;
24	C.4 Surat Jaminan Pelaksanaan;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Surat Jaminan Pelaksanaan;

25	C. 5 Surat Jaminan Uang Muka;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Surat Jaminan Uang Muka;
26	C.6 Surat Jaminan Pemeliharaan;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Surat Jaminan Pemeliharaan;
27	C.14 Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;	Mengingat pengadaan Alkes dilakukan melalui E-Purchasing maka tidak terdapat dokumen Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;

Slawi, 19 September 2025  
Pejabat Pembuat Komitmen



dr. Teguh Sukma Wibowo, MM.  
NIP.19820616 200903 1 002